



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 11347-11358

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Studi Kasus Persepsi Masyarakat Terhadap Administrasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak th. 2024 di Kabupaten Probolinggo

Eko Yudianto Yunus<sup>1</sup>, Siti Nur Fadilah<sup>2✉</sup>, Irma Nur Cahya Setyowati<sup>3</sup>, Zahrotul Karimah<sup>4</sup>,  
Maulidia Gita Lestari<sup>5</sup>, Muchammad Januar Amrullah<sup>6</sup>

Universitas Panca Marga

Email: [dhilove01@gmail.com](mailto:dhilove01@gmail.com)<sup>2✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini membahas tentang bagaimana cara menganalisis pemahaman masyarakat terhadap administrasi penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kabupaten Probolinggo. Dalam kondisi ini, peneliti menggunakan adalah kualitatif karena lebih cocok untuk memahami permasalahan yang kompleks dan subjektif seperti persepsi masyarakat terhadap proses pemilu. Permasalahan penelitian meliputi kesiapan infrastruktur, pelaksanaan kampanye pemilu, persepsi masyarakat terhadap administrasi pemilu, transparansi dan integritas penyelenggara pemilu, serta faktor-faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk meningkatkan administrasi pemilu di masa depan, diperlukan perhatian terhadap aspek-aspek seperti infrastruktur, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat menjadi panduan bagi penyelenggara pemilu dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan kualitas dan integritas pemilu, serta memperkuat sistem demokrasi lokal untuk menjamin representasi yang lebih baik bagi masyarakat.

Kata Kunci: *Persepsi Masyarakat, Administrasi Pemilu Serentak, Transparansi*

## Abstract

This research discusses how to analyze the public's understanding of the administration of the 2024 Election in Probolinggo Regency. In this condition, researchers use qualitative because it is more suitable for understanding complex and subjective problems such as public perceptions of the election process. Research problems include infrastructure readiness, election campaign implementation, public perception of election administration, transparency and integrity of election organizers, as well as factors that influence public perception of elections. The research results show that to improve election administration in the future, attention is needed to aspects such as infrastructure, transparency and public participation. The recommendations resulting from this research can serve as a guide for election organizers and other stakeholders in improving the quality and integrity of elections, as well as strengthening local democratic systems to ensure better representation for the community.

*Keywords: Public Perception, Simultaneous Election Administration, Transparency*

## PENDAHULUAN

Pemilu serentak adalah proses pemilihan umum yang dilakukan secara simultan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Probolinggo. Pemilu serentak tahun 2024 adalah aspek utama untuk memperkuat demokrasi dan akuntabilitas dalam pemerintah Negara. Administrasi pemilu serentak yang efektif dan efisien, di sisi lain sangat penting untuk menjamin proses pemilihan yang adil dan transparansi

Persepsi masyarakat terhadap administrasi pemilu juga memengaruhi keberhasilan proses pemilu. Persepsi yang positif dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan kepercayaan terhadap proses, sementara persepsi yang negatif dapat mengurangi partisipasi dan kepercayaan. Maka dari itu, penting bagi masyarakat untuk mengetahui dan memahami bagaimana cara melihat administrasi pemilu serentak di Kabupaten Probolinggo untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pemilu.

Studi kasus ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana masyarakat melihat administrasi pemilu serentak tahun 2024 di Kabupaten Probolinggo. Analisis ini akan membantu dalam mengidentifikasi tantangan dan peluang untuk meningkatkan administrasi pemilu serentak, serta menentukan standar yang lebih baik untuk penyelenggaraan pemilu serentak

Dengan demikian, latar belakang dari studi kasus ini mencakup pentingnya pemilu dalam demokrasi, peran administrasi pemilu serentak dalam memastikan proses pemilu berjalan dengan adil dan transparan, serta pentingnya memahami persepsi masyarakat terhadap administrasi pemilu serentak untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pemilu.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif dipilih untuk melakukan studi kasus mengenai persepsi masyarakat terhadap pemilu serentak tahun 2024 di Kabupaten Pangyue karena dapat memberikan gambaran yang lebih luas, komprehensif dan mendalam. Metode kuantitatif hanya dapat menguji sejumlah kecil variabel sehingga tidak dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan secara utuh. Metode kualitatif dapat mengungkap data terkait proses kerja, perkembangan aktivitas, dan uraian yang lebih luas, mendalam, lengkap, dan bermakna. Metode kualitatif juga lebih fleksibel dalam menghadapi situasi yang sebelumnya tidak terkonsep dan memungkinkan data yang diperoleh berkembang selama penelitian berlangsung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Tabel 1. Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024

Aspek Penelitian	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
Transparansi	45	35	15	5
Keadilan	40	30	20	10
Efektivitas	50	25	15	10

### Analisis Data:

Berdasarkan hasil survei, sebagian besar responden menunjukkan persepsi yang positif terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Sekitar 80% responden menyatakan setuju atau sangat setuju terhadap tingkat transparansi dalam pelaksanaan pemilu, menunjukkan adanya upaya penyelenggara untuk memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat.

Meskipun demikian, terdapat sebagian kecil responden mengungkapkan ketidaksetujuan terhadap transparansi dan keadilan. Fskta ini mengungkapkan perlunya penyelenggara pemilu untuk terus meningkatkan komunikasi dan penyuluhan kepada masyarakat untuk memperkuat kepercayaan mereka terhadap proses pemilu.

Sementara itu, sebagian besar responden juga memberikan penilaian positif terhadap efektivitas pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, dengan 75% responden menyatakan setuju atau sangat setuju. Fakta ini mengungkapkan bahwa penyelenggara pemilu berhasil mengelola berbagai tahapan pemilu dengan baik dan efisien.

## Pembahasan

### Kesiapan Infrastruktur

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyiapkan infrastruktur digital untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan dukungan tersebut meliputi penyediaan layanan telekomunikasi berkualitas, akses internet, dan pusat data. Dan layanan logistik terjamin. Secara khusus telah mengalokasikan VCPU (Virtual Central Processing Unit) 38 Ghz, RAM 84 Gb, Storage 5,99 Tb untuk mendukung pelaksanaan pemilu 2024.

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memberikan dukungan akses Internet di 14.351 titik layanan publik di seluruh Indonesia, termasuk di daerah terpencil. Tujuannya adalah untuk mendorong penyebaran pesan-pesan pemilu yang damai. Selain itu, Kementerian Perhubungan dan Informatika juga mendukung pembangunan jaringan pos di 514 kabupaten dan kota, dan sekitar 49,20% dari 7.320 jalan memiliki titik layanan pos.

Kesiapan infrastruktur pada saat pemilu 2024 merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan kelancaran dan integritas pemilihan umum. Beberapa aspek infrastruktur yang perlu dipersiapkan mencakup :

- Pendaftaran Pemilih : Sistem pendaftaran pemilih perlu diperbaharui dan disesuaikan untuk memastikan bahwa semua warga yang memenuhi syarat dapat terdaftar sebagai pemilih. Sistem ini harus dapat menangani jumlah pemilih yang besar dengan efisien dan akurat.
- Tempat Pemungutan Suara : Lokasi tempat pemungutan suara perlu dipilih dengan cermat untuk memastikan aksesibilitas bagi semua pemilih. Infrastruktur fisik seperti tempat-tempat pemungutan suara harus memadai dan dapat diakses oleh pemilih yang memiliki kebutuhan khusus.
- Sistem Teknologi Informasi : Sistem teknologi informasi yang andal diperlukan untuk mendukung berbagai aspek pemilu, termasuk pengelolaan daftar pemilih, pelaporan hasil pemungutan suara, dan pemantauan proses pemilu secara real-time. Keamanan dan keandalan sistem ini juga penting untuk mencegah ancaman siber.
- Logistik : Persiapan logistik termasuk pengadaan dan distribusi surat suara, Kabupaten suara, serta bahan-bahan kampanye. Sistem transportasi dan penyediaan fasilitas di tempat pemungutan suara juga harus diperhitungkan untuk memastikan semua barang dan perlengkapan dapat diantarkan tepat waktu.
- Keamanan: Langkah-langkah keamanan harus dipersiapkan untuk melindungi tempat-tempat pemungutan suara dari ancaman keamanan potensial. Ini melibatkan

kerjasama antara kepolisian, aparat keamanan, dan lembaga-lembaga terkait lainnya.

#### Pelaksanaan Kampanye Pemilu

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1 Tahun 2020 Nomor 35 tentang Pengaturan Segala Jenis Kegiatan, terdapat 9 kategori kegiatan, yaitu:

- Debat publik/debat publik antar kandidat
- Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan
- Pemasangan alat peraga di tempat umum
- Mendistribusikan materi acara kepada Masyarakat
- Sosialisasi melalui media cetak dan elektronik
- Disiarkan melalui radio dan televisi
- Rapat terbatas
- Rapat Umum Pemegang Saham
- tatap muka

Pelaksanaan kampanye pemilu di Kabupaten Probolinggo merupakan bagian penting dari proses demokratisasi yang melibatkan partai politik, calon legislatif, dan calon kepala daerah dalam berinteraksi dengan pemilih. Kampanye ini adalah cara bagi para kandidat dan partai politik untuk memperkenalkan diri, menyampaikan visi dan misi, serta memperjuangkan agenda politik mereka kepada masyarakat. Dalam Kabupaten Probolinggo, pelaksanaan kampanye pemilu akan melibatkan sejumlah tahapan dan kegiatan, termasuk:

- a. Peraturan dan Penetapan Jadwal : Bawaslu Kabupaten Probolinggo akan menetapkan peraturan dan jadwal resmi untuk pelaksanaan kampanye sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini termasuk menetapkan waktu, lokasi, dan aturan yang harus dipatuhi oleh para kandidat dan partai politik selama masa kampanye.
- b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) : Partai politik dan kandidat akan melakukan pemasangan APK sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Bawaslu. APK harus dipasang di lokasi yang diizinkan dan tidak boleh melanggar aturan yang ada.
- c. Kegiatan Kampanye di Lapangan : Para kandidat dan partai politik akan melakukan berbagai kegiatan kampanye di lapangan, termasuk rapat umum, pertemuan dengan masyarakat, kampanye door-to-door, dan acara-acara lainnya untuk memperkenalkan program-program mereka kepada pemilih.

- d. Debat Publik : Bawaslu Kabupaten Probolinggo mungkin akan menyelenggarakan debat publik antara para kandidat untuk memungkinkan pemilih untuk memahami lebih baik visi, misi, dan gagasan mereka.
- e. Pelaporan dan Evaluasi : Setelah masa kampanye berakhir, akan dilakukan pelaporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kampanye untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap aturan serta mengevaluasi keefektifan strategi kampanye yang telah dilakukan.

#### Persepsi Masyarakat terhadap Administrasi Pemilu Serentak di Kabupaten Probolinggo

Dalam menentukan keberhasilan dan integritas pemilihan umum masyarakat memiliki harapan bahwa proses pemilu akan dijalankan dengan transparan, adil, dan efisien. Persepsi positif tentang administrasi pemilu dapat memperkuat legitimasi pemerintah yang terpilih dan memastikan keterlibatan aktif pemilih dalam proses demokratis. Namun, jika masyarakat memiliki keraguan atau ketidakpercayaan terhadap administrasi pemilu, ini dapat merusak kepercayaan mereka pada institusi demokrasi dan mengurangi kontribusi para pemilih. Maka dari itu, penting bagi setiap penyelenggara pemilu seperti Bawaslu dan KPU Kabupaten Probolinggo, untuk memastikan bahwa setiap tahap administrasi pemilu dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Langkah-langkah komunikasi yang efektif, edukasi pemilih, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pemantauan proses pemilu juga dapat membantu memperkuat persepsi positif tentang administrasi pemilu di Kabupaten Probolinggo. Dengan demikian, persepsi masyarakat terhadap administrasi pemilu serentak di Kabupaten Probolinggo dapat menjadi indikator kesehatan demokrasi lokal dan kepercayaan publik terhadap sistem politik yang ada.

Persepsi masyarakat terhadap administrasi pemilu serentak di Kabupaten Probolinggo dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk pengalaman individu, informasi yang diterima, dan keyakinan politik mereka. Berikut beberapa contoh dari berbagai persepsi masyarakat terhadap administrasi pemilu :

1. Persepsi Positif

Sebagian Masyarakat memiliki persepsi positif terhadap administrasi pemilu jika mereka melihat bahwa proses pemilu dijalankan dengan transparan, adil, dan efisien. Mereka mungkin merasa bahwa hak suara mereka dihargai dan bahwa pemerintah berusaha untuk memastikan bahwa setiap warga Indonesia berkesempatan untuk ikut serta didalam pemilihan umum. Contoh dari persepsi positif masyarakat bisa termasuk

apresiasi terhadap upaya-upaya penyelenggara pemilu untuk memberikan informasi yang jelas dan akses mudah terhadap tempat pemungutan suara.

## 2. Persepsi Negatif

Di sisi lain, ada juga masyarakat yang memiliki persepsi negatif terhadap administrasi pemilu jika mereka merasa bahwa proses pemilu tidak transparan, terjadi kecurangan, atau terdapat ketidakadilan dalam pelaksanaannya. Mereka mungkin merasa bahwa hak suara mereka diremehkan atau bahwa pemerintah tidak cukup menjaga integritas pemilu. Contoh dari persepsi negatif masyarakat bisa termasuk ketidakpuasan terhadap keputusan atau tindakan penyelenggara pemilu yang dianggap tidak adil atau tidak profesional.

## 3. Persepsi Netral

Ada juga masyarakat yang memiliki persepsi netral terhadap administrasi pemilu, di mana mereka mungkin tidak terlalu peduli atau terlibat secara langsung dalam proses pemilu. Mereka mungkin menganggap pemilu sebagai bagian yang wajar dari kehidupan politik tanpa terlalu mempertimbangkan secara mendalam tentang integritas atau keadilan pemilihan tersebut.

## 4. Persepsi Bervariasi

Persepsi masyarakat terhadap administrasi pemilu juga dapat bervariasi di antara kelompok-kelompok sosial, demografis, atau politik yang berbeda. Misalnya, pendukung partai politik tertentu mungkin memiliki persepsi yang berbeda dengan mereka yang mendukung partai politik lainnya, tergantung pada bagaimana proses pemilu memengaruhi kepentingan dan pandangan politik mereka.

## Penilaian Terhadap Transparansi dan Integritas Penyelenggara Pemilu

Penilaian terhadap transparansi dan integritas penyelenggara pemilu merupakan aspek kunci dalam menilai kesehatan demokrasi suatu negara. Transparansi mencakup keterbukaan dan aksesibilitas informasi terkait proses pemilu, termasuk aturan dan prosedur, data pemilih, dan keputusan yang diambil oleh penyelenggara pemilu. Integritas, di sisi lain, mencakup keadilan, kejujuran, dan ketidakberpihakan dalam menjalankan proses pemilu, serta penegakan aturan dan hukum secara konsisten dan adil. Penilaian transparansi dan integritas penyelenggara pemilu dapat meliputi evaluasi terhadap kejelasan aturan dan prosedur, ketersediaan informasi publik tentang pemilu, keberadaan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas, serta tanggapan terhadap pelanggaran atau kecurangan yang terjadi selama pemilihan. Dengan mengukur transparansi dan integritas

penyelenggara pemilu, masyarakat dapat memahami sejauh mana proses pemilu dijalankan dengan adil dan demokratis, serta dapat memberikan dasar untuk perbaikan dan reformasi dalam sistem pemilihan suatu negara.

#### Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat terhadap pemilu

Stephen P. Robbins (2019:103) berpendapat bahwa banyak faktor yang mempengaruhi dan terkadang mengganggu persepsi, antara lain:

- a. Faktor evaluator: sikap, motivasi, minat, pengalaman, harapan.
- b. Faktor situasional: waktu, lingkungan kerja, lingkungan sosial.
- c. Faktor sasaran: Inovasi, gerak, suara, ukuran, konteks, kedekatan, kesamaan.

Abu Ahmadi (dalam Ani Wijaya 2019; 22), persepsi biasanya terjadi karena dua faktor, yaitu faktor internal (berasal dari dalam diri individu, berupa pilihan seseorang untuk menerima dan menghadapi pengaruh dari luar), dan faktor eksternal ( sumber di luar individu).

Ada keterkaitan antara ide dan pemilih karena ide muncul dari komunitas dan pemilih itu sendiri adalah komunitas. Menurut Irwanto (dalam Ani Wijaya, 2019), setelah individu berinteraksi dengan objek yang dipersepsikan, maka hasil persepsinya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu persepsi positif dan persepsi negatif. Dapat dikatakan umpan balik positif atau negatif yang dirasakan dapat mempengaruhi perilaku seseorang.

#### Korelasi hasil Pemilu terhadap Kualitas Demokrasi Lokal

Korelasi antara hasil pemilu dan kualitas demokrasi lokal di Kabupaten Probolinggo merupakan indikator penting dalam mengevaluasi keberhasilan sistem demokrasi di tingkat lokal. Hasil pemilu, termasuk komposisi pemerintahan yang terpilih dan partisipasi pemilih, memberikan gambaran tentang preferensi politik dan tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses politik. Kualitas demokrasi lokal, di sisi lain, mencakup faktor-faktor seperti kebebasan politik, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Korelasi yang kuat antara hasil pemilu dan kualitas demokrasi lokal di Kabupaten Probolinggo mungkin mencerminkan beberapa hal. Misalnya, jika hasil pemilu mencerminkan partisipasi pemilih yang tinggi dan komposisi pemerintahan yang beragam serta inklusif, ini dapat menunjukkan adanya kesadaran politik yang kuat dan kepercayaan yang tinggi dalam proses demokratis. Selain itu, jika pemilih merasa bahwa pemilihan berlangsung secara adil dan transparan, ini dapat memperkuat legitimasi pemerintahan yang terpilih dan memperkuat fondasi demokrasi lokal.

Namun, jika terdapat ketidaksesuaian antara hasil pemilu dan persepsi tentang kualitas demokrasi lokal, hal ini dapat menimbulkan tantangan dalam menjaga stabilitas politik dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi-institusi demokratis. Mungkin ada kebutuhan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi korelasi antara hasil pemilu dan kualitas demokrasi lokal, seperti kebijakan pemilu, proses pemilihan, dan partisipasi politik masyarakat.

Dengan memahami korelasi antara hasil pemilu dan kualitas demokrasi lokal di Kabupaten Probolinggo, Pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya dapat mengambil tindakan untuk memperkuat dasar-dasar fondasi demokrasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memastikan bahwa proses politik berlangsung dengan transparan, adil, dan efektif.

### Rekomendasi untuk Peningkatan Administrasi Pemilu di Masa Depan

Untuk meningkatkan administrasi pemilu di masa depan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan:

1. Penguatan Transparansi

Transparansi dalam administrasi pemilu mengacu pada keterbukaan dan aksesibilitas informasi terkait proses pemilu. Ini berarti memastikan bahwa aturan dan prosedur pemilu dipublikasikan dengan jelas dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, Seluruh proses pemilu, termasuk registrasi pemilih, kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan hasil, harus dilakukan secara transparan dan dapat diawasi oleh masyarakat.

2. Penyuluhan Pemilih

Kampanye penyuluhan pemilih adalah upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemilihan umum. Ini melibatkan edukasi tentang hak-hak pemilih, prosedur pemilihan, dan dampak politik dari partisipasi atau ketidakt partisipasi dalam pemilu.

3. Peningkatan Teknologi Informasi

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat mendukung peningkatan efisiensi dan transparansi dalam penyelenggaraan pemilu. Ini termasuk penggunaan sistem elektronik untuk pendaftaran pemilih, pemungutan suara elektronik, dan penghitungan hasil secara otomatis.

#### 4. Penguatan Pengawasan Independen

Lembaga pengawas pemilu, seperti Bawaslu, memiliki peran kunci dalam mengawasi dan memastikan integritas pemilu. Sangat penting untuk memberikan dukungan dan alokasi sumber daya yang memadai untuk lembaga-lembaga ini agar dapat melakukan tugasnya dengan efektif dan independen.

#### 5. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas

Petugas pemilu, termasuk petugas TPS, perlu menerima pelatihan yang berkualitas untuk memastikan bahwa mereka memahami tugas-tugas mereka dan dapat menjalankannya dengan baik. Pelatihan ini juga dapat mencakup pengetahuan tentang peraturan pemilu, tata cara penghitungan suara, dan penanganan situasi darurat.

#### 6. Partisipasi Masyarakat Sipil

Melibatkan masyarakat sipil dalam pemantauan dan pengawasan pemilu dapat membantu meningkatkan akuntabilitas dan integritas proses pemilu. LSM, organisasi masyarakat, dan pengamat pemilu dapat memberikan kontribusi berharga dalam memantau kepatuhan terhadap aturan pemilu dan menanggapi pelanggaran yang terjadi.

#### 7. Evaluasi dan Pembelajaran

Evaluasi menyeluruh setelah setiap pemilu diperlukan untuk mengidentifikasi kelemahan dan perbaikan yang dapat dilakukan di masa mendatang. Ini melibatkan analisis terhadap pelaksanaan pemilu, termasuk keberhasilan dan tantangan yang dihadapi, dan memberikan dasar untuk melakukan perbaikan dalam administrasi pemilu berikutnya.

### SIMPULAN

Penelitian ini menyoroti pentingnya memahami persepsi masyarakat terhadap administrasi pemilu serentak tahun 2024 di Kabupaten Probolinggo. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, studi ini berhasil mengidentifikasi permasalahan terkait persepsi masyarakat, transparansi, dan integritas penyelenggara pemilu. Temuan ini memberikan wawasan yang berharga bagi penyelenggara pemilu dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kualitas dan integritas pemilu di masa depan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi dalam memperkuat demokrasi lokal, tetapi juga membantu memastikan representasi yang lebih baik bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo dan wilayah lainnya. Dengan adanya rekomendasi

yang dihasilkan, diharapkan proses pemilu di masa depan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan transparan, sehingga memperkuat sistem demokrasi secara keseluruhan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, V. D., & Rohim, A. (2024). Upaya bawaslu kabupaten probolinggo meningkatkan peran serta mahasiswa dalam pengawasan partisipatif. *Justness: Jurnal Hukum Politik dan Agama*, 4(01). <https://doi.org/10.61974/justness.v4i01.59>
- Nabilah, R., Afrizal, S., & Bahrudin, F. A. (2022). Persepsi masyarakat desa terhadap fenomena politik uang dalam pemilihan umum. *Jurnal Publisitas*, 8(2), 84–96. <https://doi.org/10.37858/publisitas.v8i2.132>
- Putra, B. A. L., Basir, B., & Lindiasari, P. (2024). Deteksi dini penyelenggaraan pemilu tahun 2024 di wilayah hukum kecamatan cibinong. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(3), 1690–1701. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i3.14733>
- Anugrah, A. R. S., & Jalius, A. A. (2023). Potensi konflik dampak penyelenggaraan pemilu serentak 2024: Studi kasus kalimantan barat. *Jurnal Global Futuristik*, 1(1), 54–72. <https://doi.org/10.59996/globalistik.v1i1.120>
- Marwiyah, S., Busthomi, A. N., & Septian, E. D. (2023). Peningkatan kualitas pelayanan publik di kabupaten probolinggo tahun 2021-2024 (Study kasus pada unit peningkatan kualitas pelayanan publik):(Study kasus pada unit peningkatan kualitas pelayanan publik). *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 70–81. <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v7i1.24156>
- Dedi, A. (2019). Analisis sistem pemilihan umum serentak 2019. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(3), 213–226. <https://doi.org/10.25147/moderat.v5i3.2676>
- Zainal, Z. (2015). Persepsi masyarakat terhadap partai politik di desa terantang kecamatan mandastana kabupaten barito kuala. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(9), 120476. <https://www.neliti.com/id/publications/120476/>
- Fauzi, Moch. S. F., & Wahyono, E. (2021). Peran badan pengawas pemilihan umum dalam Penegakan hukum pelaksanaan pemilihan umum dprd Kota probolinggo. *IUS*, 8(2), 13–27. <https://doi.org/10.51747/ius.v8i2.687>
- Amal, I. (2022). Fenomena dan faktor penyebab masifnya praktik politik uang pada pemilu di provinsi banten. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 14(03), 592–606. <https://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/MADANI/article/view/3824>
- Wou, A. (2018). Persepsi masyarakat terhadap politik uang (Money politic) dalam setiap pesta demokrasi di kampung soryar distrik biak timur kabupaten biak numfor. *Gema*

*Kampus IISIP YAPIS Biak*, 13(1), 8–14. <https://doi.org/10.52049/gemakampus.v13i1.58>  
Ibad, M. N., Salbiyah, B., & Saputri, F. I. (2023). Peran dan kewenangan badan pengawas pemilihan umum dalam penanganan dugaan pelanggaran administratif. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(2), 125–146. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v2i2.272>.